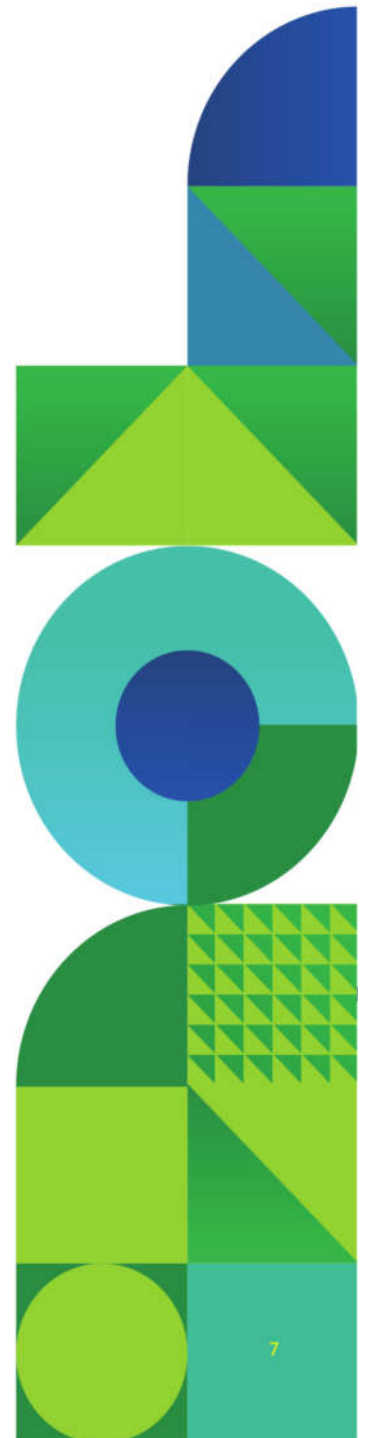


Catatan atas Laporan Keuangan



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	1
1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	1
1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	4
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	5
2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	5
2.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN	5
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	7
3.1 RINCIAN DAN PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN	7
3.1.1 Pendapatan-LRA	7
3.1.2 Belanja	7
3.2 RINCIAN DAN PENJELASAN NERACA.....	20
3.2.1 Aset.....	20
3.2.2 Kewajiban	33
3.2.3 Ekuitas	35
3.3 RINCIAN DAN PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL	35
3.3.1 Pendapatan-LO	35
3.3.2 Beban.....	36
3.3.3 Surplus/Defisit-LO.....	39
3.4 RINCIAN DAN PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	39
3.4.1 Ekuitas Awal.....	39
3.4.2 Surplus/Defisit	39
3.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	40
3.4.4 Ekuitas Akhir	41
BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	42
BAB V PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	5
Tabel 3.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	7
Tabel 3.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai	8
Tabel 3.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Sosial Induk dan UPTD.....	9
Tabel 3.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa.....	9
Tabel 3.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Sosial Induk dan UPTD	10
Tabel 3.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah	11
Tabel 3.7	Rincian Hibah Dinas Sosial	11
Tabel 3.8	Rincian Penerima Hibah.....	11
Tabel 3.9	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial.....	13
Tabel 3.10	Rincian Penerima Bantuan Sosial	13
Tabel 3.11	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	16
Tabel 3.12	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin di Dinas Sosial Induk dan UPTD	17
Tabel 3.13	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18
Tabel 3.14	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan di Dinsos Induk dan UPTD	18
Tabel 3.15	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19
Tabel 3.16	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya di Dinas Sosial Induk dan UPTD.....	19
Tabel 3.17	Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan	19
Tabel 3.18	Rincian Persediaan Dinas Sosial.....	20
Tabel 3.19	Saldo Persediaan di Dinas Sosial Induk dan UPTD	21
Tabel 3.20	Aset Tetap Dinas Sosial.....	21
Tabel 3.21	Rincian Aset Tetap - Tanah	22
Tabel 3.22	Rincian Tanah Dinas Sosial dan UPTD.....	22
Tabel 3.23	Mutasi Tanah	22
Tabel 3.24	Rincian Aset Tetap - Peralatan dan Mesin.....	22
Tabel 3.25	Peralatan dan Mesin Dinas Sosial dan UPTD	23
Tabel 3.26	Mutasi Peralatan dan Mesin.....	23
Tabel 3.27	Penerimaan Hibah	25
Tabel 3.28	Rincian Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	25
Tabel 3.29	Gedung dan Bangunan Dinas Sosial dan UPTD.....	26
Tabel 3.30	Mutasi Gedung dan Bangunan	26
Tabel 3.31	Rincian Aset Tetap - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27
Tabel 3.32	Jalan, Jaringan, dan Irigasi Dinas Sosial dan UPTD.....	27
Tabel 3.33	Mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27
Tabel 3.34	Rincian Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya.....	28
Tabel 3.35	Aset Tetap Lainnya Dinas Sosial dan UPTD.....	28

Tabel 3.36 Mutasi Aset Tetap Lainnya	29
Tabel 3.37 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan	29
Tabel 3.38 Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Sosial dan UPTD	29
Tabel 3.39 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	30
Tabel 3.40 Rincian Akumulasi Penyusutan.....	30
Tabel 3.41 Akumulasi Penyusutan Dinas Sosial dan UPTD.....	31
Tabel 3.42 Rincian Aset Lainnya	31
Tabel 3.43 Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.....	31
Tabel 3.44 Rincian Aset Tak Berwujud	32
Tabel 3.45 Mutasi Aset Tak Berwujud.....	32
Tabel 3.46 Rincian Aset Lain-lain	33
Tabel 3.47 Rincian Utang Belanja	33
Tabel 3.48 Utang Belanja Dinas Sosial Induk dan UPTD.....	33
Tabel 3.49 Pendapatan Dinas Sosial Induk dan UPTD.....	35
Tabel 3.50 Rincian Beban Pegawai.....	36
Tabel 3.51 Beban Pegawai Dinas Sosial Induk dan UPTD.....	36
Tabel 3.52 Rincian Beban Barang dan Jasa	37
Tabel 3.53 Beban Barang dan Jasa Dinas Sosial Induk dan UPTD	37
Tabel 3.54 Rincian Beban Hibah.....	38
Tabel 3.55 Beban Penyusutan Dinas Sosial	38
Tabel 3.56 Beban Penyusutan Dinas Sosial Induk dan UPTD	38
Tabel 3.57 Rincian Ekuitas Awal Dinas Sosial Induk dan UPTD	39
Tabel 3.58 Rincian Surplus (Defisit)-LO Dinas Sosial Induk dan UPTD	40
Tabel 3.59 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.....	40
Tabel 3.60 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Dinsos Induk dan UPTD	40
Tabel 4.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	42
Tabel 4.2 Capaian Kinerja Tahun 2021.....	42
Tabel 4.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	43
Tabel 4.4 Capaian Hasil Penanganan PMKS Melalui Rehabilitasi Sosial	44
Tabel 4.5 Capaian Hasil Penanganan PMKS Melalui Perlindungan dan Jaminan Sosial	44
Tabel 4.6 Capaian Hasil Penanganan PMKS Melalui Penanganan Fakir Miskin.....	45
Tabel 4.7 Capaian Hasil Penanganan PMKS dalam BRTPD	45
Tabel 4.8 Capaian Hasil Penanganan PMKS dalam BPRSW	46
Tabel 4.9 Capaian Hasil Penanganan PMKS dalam BRSBKL	46
Tabel 4.10 Capaian Hasil Penanganan PMKS dalam BPRSR.....	47
Tabel 4.11 Capaian Hasil Penanganan PMKS dalam BSRPA.....	47
Tabel 4.12 Capaian Hasil Penanganan PMKS dalam BPSTW.....	48
Tabel 4.13 Pengukuran Capaian Sasaran 1	48
Tabel 4.14 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2021	49

Tabel 4.15 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2.....	50
Tabel 4.16 Capaian Hasil Pemberdayaan PSKS dan Masyarakat Melalui Pemberdayaan PSKS dan Penanamam Nilai-Nilai Kepahlawanan	51
Tabel 4.17 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2021	51
Tabel 4.18 Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2021	52
Tabel 4.19 Target dan Realisasi SDGs Dinas Sosial Tahun 2021	53
Tabel 4.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2021	54
Tabel 4.21 Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Sosial DIY.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Sosial diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa

- Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 12);
 17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 7);
 18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
 19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
 20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 32);
 21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
 22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 56);
 23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 57);
 24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 114) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 69);
 25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 113) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 33);

26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 71);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 100);
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 104).

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan OPD
 - 3.1 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan OPD
 - 3.1.1 Pendapatan-LRA
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.1.3 Aset
 - 3.1.4 Kewajiban
 - 3.1.5 Ekuitas
 - 3.1.6 Pendapatan-LO
 - 3.1.7 Beban
 - 3.1.8 Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab IV Penjelasan Atas Informasi-Informasi Nonkeuangan OPD
- Bab V Penutup

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 yaitu Pendapatan sebesar Rp388.200.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp388.200.000,00. Realisasi belanja sebesar Rp89.699.907.923,04 atau 87,02% dari anggaran sebesar Rp103.085.207.542,00. Adapun Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Berlebih/ (berkurang) (Rp)	Prosentase (%)
PENDAPATAN DAERAH	388.200.000,00	388.200.000,00	0,00	100,00
Pendapatan Asli Daerah	388.200.000,00	388.200.000,00	0,00	100,00
Retribusi Daerah	388.200.000,00	388.200.000,00	0,00	100,00
BELANJA DAERAH	103.085.207.542,00	89.699.907.923,04	(13.385.299.618,96)	87,02
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	56.304.067.617,00	51.508.686.787,00	(4.795.380.830,00)	91,48
Program Pemberdayaan Sosial	4.010.043.200,00	3.915.038.200,00	(95.005.000,00)	97,63
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	2.911.000,00	2.911.000,00	-	100,00
Program Rehabilitasi Sosial	24.169.414.725,00	20.622.560.925,00	(3.546.853.800,00)	85,33
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	10.435.636.000,00	6.367.513.300,00	(4.068.122.700,00)	61,02
Program Penanganan Bencana	1.867.038.000,00	1.383.330.900,00	(483.707.100,00)	74,09
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	381.450.000,00	373.173.337,20	(8.276.662,80)	97,83
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	5.914.647.000,00	5.526.693.473,84	(387.953.526,16)	93,44

2.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Secara keseluruhan realisasi belanja Dinas Sosial tahun 2021 sebesar 89.699.907.923,04 atau 87,02%. Adapun sisa anggaran 13.385.299.618,96 atau 12,98% antara lain bersumber dari:

- Sisa lelang pengadaan barang dan jasa
- Mengikuti SE Nomor: I/SE/III2020 Tentang Pelaksanaan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Daerah Istimewa Yogyakarta agar melakukan penundaan atau pembatalan pelaksanaan kegiatan, khususnya yang melibatkan banyak orang dalam upaya pencegahan pandemic COVID-19 di DIY
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber
- Efisiensi uang saku peserta kegiatan
- Efisiensi tagihan air, listrik, telepon dan kegiatan belanja lain yang menyesuaikan harga pasar

- Efisiensi belanja mobilitas darat, akomodasi dan transportasi menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di lapangan
- Efisiensi belanja sewa (tempat, meja, kursi, genset, tenda, sound system) menyesuaikan kondisi di lapangan

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 RINCIAN DAN PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	2021	2020 (Audited)
3.1.1 Pendapatan-LRA	Rp388.200.000,00	Rp532.200.000,00

Pendapatan-LRA Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp388.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp388.200.000,00 atau 100,00%. Realisasi Pendapatan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp144.000.000,00 dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp532.200.000,00. Penurunan tersebut merupakan dampak terjadinya pandemi covid-19, yang mengakibatkan rasionalisasi target pendapatan karena selama pandemi covid-19 sebagian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW) dibawa pulang oleh penanggung jawab/keluarganya yang terdampak secara ekonomi karena pandemi covid-19.

3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	Rp388.200.000,00	Rp532.200.000,00
---------------------------------------	-------------------------	-------------------------

Pendapatan Asli Daerah-Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp388.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp388.200.000,00 atau 100,00%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah-Dinas Sosial Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp144.000.000,00 atau 27,06% dibandingkan realisasi tahun lalu yaitu sebesar Rp532.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	Tahun 2021		(% Capaian	Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Retribusi Daerah	388.200.000,00	388.200.000,00	100	532.200.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	388.200.000,00	388.200.000,00	100	532.200.000,00
	Retribusi Pemakaian Ruangan	388.200.000,00	388.200.000,00	100	532.200.000,00

Penjelasan:

Retribusi Pemakaian Ruangan dianggarkan Rp388.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp388.200.000,00 atau 100% merupakan pendapatan dari Retribusi Pemakaian Ruang berupa sewa Ruang untuk kantin dan tempat fotocopy sebesar Rp4.200.000,00 di Dinas Sosial Induk dan Retribusi Pemakaian Ruang/kamar untuk PPKS di BPSTW sebesar Rp384.000.000,00

3.1.2 Belanja	Rp89.699.907.923,04	Rp62.312.687.145,00
----------------------	----------------------------	----------------------------

Anggaran Belanja Tahun 2021 mengalami *refocusing* dan realokasi anggaran sesuai dengan arahan Pemerintah terkait masih adanya pandemi covid-19 yang selanjutnya ditetapkan dalam APBD Perubahan 2021.

Anggaran Belanja Perubahan Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp103.085.207.542,00. Sampai dengan akhir Tahun 2021, realisasi anggaran belanja tersebut sebesar Rp89.699.907.923,04 atau 87,02%. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp27.387.220.778,04 atau 43,95% dibandingkan Realisasi Belanja Tahun 2020 sebesar Rp62.312.687.145,00. Adapun rincian anggaran dan belanja adalah sebagai berikut:

3.1.2.1 Belanja Operasi**Rp85.782.518.864,04****Rp59.644.152.724,00**

Belanja Operasi Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp98.682.802.025,00 dan realisasi sebesar Rp85.782.518.864,04 atau 86,93%. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 Rp85.782.518.864,04 mengalami kenaikan Rp26.138.366.140,04 atau 43,82% dibandingkan dengan Realisasi Belanja Tahun 2020 yaitu sebesar Rp59.644.152.724,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

3.1.2.1.1 Belanja Pegawai**Rp35.638.179.721,00****Rp25.090.556.269,00**

Belanja Pegawai Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp38.339.993.759,00 dan realisasi sebesar Rp35.638.179.721,00 atau 92,95% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN			
1	Belanja Gaji Pokok ASN	20.149.128.235,00	18.004.722.710,00	89,36
	Belanja Gaji Pokok PNS	13.790.412.966,00	11.848.634.490,00	85,92
	Belanja Gaji Pokok PPPK	6.358.715.269,00	6.156.088.220,00	96,81
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.077.016.312,00	1.017.638.556,00	94,49
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.071.457.192,00	1.012.450.044,00	94,49
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.559.120,00	5.188.512,00	93,33
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	430.100.000,00	399.555.000,00	92,90
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	430.100.000,00	399.555.000,00	92,90
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	343.190.000,00	325.780.000,00	94,93
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	339.830.000,00	325.780.000,00	95,87
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.360.000,00	0,00	0,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	414.945.000,00	404.200.000,00	97,41
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	414.945.000,00	404.200.000,00	97,41
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	661.058.380,00	646.710.600,00	97,83
	Belanja Tunjangan Beras PNS	656.476.138,00	642.655.080,00	97,89
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.582.242,00	4.055.520,00	88,51
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	40.819.473,00	36.423.616,00	89,23
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	40.819.473,00	36.423.616,00	89,23
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	186.473,00	174.665,00	93,67
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	185.281,00	173.873,00	93,84
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.192,00	792,00	66,44
	Jumlah	23.116.443.873,00	20.835.205.147,00	90,13
II	Belanja Tambahan Penghasilan ASN			
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	14.933.983.886,00	14.515.468.574,00	97,20

	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	13.533.006.210,00	13.114.490.898,00	96,91
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1.400.977.676,00	1.400.977.676,00	100
	Jumlah	14.933.983.886,00	14.515.468.574,00	97,20
III	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			
1	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	11.646.000,00	11.646.000,00	100
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	11.646.000,00	11.646.000,00	100
2	Belanja Honorarium	187.920.000,00	185.860.000,00	98,90
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	187.920.000,00	185.860.000,00	98,90
3	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	90.000.000,00	90.000.000,00	100
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	11.400.000,00	11.400.000,00	100
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	78.600.000,00	78.600.000,00	100
	Jumlah	289.566.000,00	287.506.000,00	99,29
	Jumlah	38.339.993.759,00	35.638.179.721,00	92,95

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai pada Dinas Sosial Induk dan UPTD sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Sosial Induk dan UPTD

No	Unit	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Dinas Sosial Induk	22.782.976.221,00	21.614.359.657,00	94,87
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	3.354.421.692,00	3.016.923.138,00	89,94
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	1.627.066.510,00	1.539.378.001,00	94,61
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRBKL)	2.734.617.100,00	2.504.731.020,00	91,59
5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	2.066.896.751,00	1.860.386.700,00	90,01
6	Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	2.862.310.468,00	2.501.375.648,00	87,39
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	2.911.705.017,00	2.601.025.557,00	89,33
	Jumlah	38.339.993.759,00	35.638.179.721,00	92,95

3.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Rp44.935.913.478,04

Rp34.553.596.455,00

Belanja Barang dan Jasa Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp55.118.208.266,00 dan realisasi sebesar Rp44.935.913.478,04 atau 81,53% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I	Belanja Barang	28.491.015.075,00	21.148.320.219,00	74,23

	Belanja Barang Pakai Habis	28.359.319.675,00	21.018.159.819,00	74,11
	Belanja Barang Tak Habis Pakai	131.695.400,00	130.160.400,00	98,83
II	Belanja Jasa	21.354.909.832,00	19.084.085.526,00	89,37
	Belanja Jasa Kantor	19.567.031.532,00	17.783.377.396,00	90,88
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	826.900.000,00	503.255.000,00	60,86
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	150.500.000,00	96.500.000,00	64,12
	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	26.700.000,00	26.700.000,00	100,00
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.977.350,00	9.515.000,00	95,37
	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	130.000.000,00	129.200.000,00	99,38
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	643.800.950,00	535.538.130,00	83,18
III	Belanja Pemeliharaan	3.155.491.359,00	2.717.658.001,04	86,12
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	466.385.000,00	417.908.998,00	89,61
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.542.614.359,00	2.154.246.628,04	84,73
	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	139.562.000,00	138.572.375,00	99,29
	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.930.000,00	6.930.000,00	100,00
IV	Belana Perjalanan Dinas	1.766.867.000,00	1.635.924.732,00	92,59
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.766.867.000,00	1.635.924.732,00	92,59
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	349.925.000,00	349.925.000,00	100,00
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	349.925.000,00	349.925.000,00	100,00
	Jumlah	55.118.208.266,00	44.935.913.478,04	81,53

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Sosial Induk dan UPTD sebagai berikut:

Tabel 3.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Sosial Induk dan UPTD

No	Unit	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Dinas Sosial Induk	27.713.884.625,00	21.848.293.277,04	78,84
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	5.688.814.999,00	4.585.294.095,00	80,60
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	3.118.250.000,00	2.897.087.329,00	92,91
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	6.854.180.777,00	5.873.747.885,00	85,70
5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	3.349.018.050,00	2.625.338.863,00	78,39
6	Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	3.731.230.365,00	3.143.797.408,00	84,26
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	4.662.829.450,00	3.962.354.621,00	84,98
	Jumlah	55.118.208.266,00	44.935.913.478,04	81,53

3.1.2.2 Belanja Hibah

Rp812.425.665,00

Rp0,00

Belanja Hibah Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp828.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp812.425.665,00 atau 98,05% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
A	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia			
I	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	176.600.000,00	176.600.000,00	100,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	176.600.000,00	176.600.000,00	100,00
II	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00
III	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	606.000.000,00	589.825.665,00	97,33
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	286.000.000,00	286.000.000,00	100,00
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	320.000.000,00	303.825.665,00	94,95
	Jumlah	828.600.000,00	812.425.665,00	98,05

Belanja Hibah Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp828.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp812.425.665,00 atau 98,05% yang terdiri dari hibah uang sebesar Rp508.600.000,00 dan hibah yang bersumber dari Dana Keistimewaan berupa hibah barang sebesar Rp303.825.665,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7 Rincian Hibah Dinas Sosial

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Hibah Uang	508.600.000,00	508.600.000,00	100,00
2	Hibah Barang	320.000.000,00	303.825.665,00	94,95
	Jumlah	828.600.000,00	812.425.665,00	98,05

Adapun rincian penerima hibah Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Rincian Penerima Hibah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Hibah Uang			

1	Yayasan Panti Asuhan Anak Balita Gotong Royong - Jaranan RT 06 Panggunharjo Sewon Bantul	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
2	Komisi Daerah Lanjut Usia DIY - Gedhong Indische, Kepatihan Yogyakarta	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
3	LKS Lembaga Orang Tua Asuh DIY - Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
4	LKSA Yayasan Realino Seksi Pengabdian Masyarakat - Jl mataram No. 66 Yogyakarta	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
5	Rumah Anak Indonesia - Kalijir Lor Rt. 07 Rw 13 Kalitirto Berbah Sleman	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
6	Rumah Singgah Ahmad Dahlan - Jl. Sidobali UH II/396 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
7	Rumah Singgah dan Belajar Diponegoro - Tapanrejo Denokan Rt. 10 Rw 33 Tajem Maguwoharjo Depok Sleman	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
8	Rumah Singgah Hafara - Gonjen RT 05 Tamantirto Kasihan Bantul	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
9	Yayasan Lembaga Perlindungan Anak - Jl Kapas No. 11 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
10	Yayasan Rumah Impian - Jl. Kenanga No. 1 No. 30 Rt. 04 Rw. 01, Juwangen, Purwomartani, Kalasan, Sleman	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
11	Yayasan Satunama - Jl. Sambisari No.99 Duwet Sendangadi Mlati Sleman	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
12	Yayasan Indriya-Nati - Jl Ireda Gg. Sidoasih, Pujokusuman MG I/382 Yogyakarta	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
13	Rumah Singgah Anak Mandiri - Jl Perintis Kemerdekaan No.33B, Umbulharjo, Yogyakarta	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
14	Komite Perlindungan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY	176.600.000,00	176.600.000,00	100,00
15	Yayasan Sayap Ibu - Jl Rajawali No. 3 Pringwulung Condongcatur	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
16	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat D. I. Yogyakarta	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
17	LK3 "Teratai" Propinsi D. I. Yogyakarta - Jl. Lempuyangan No. 1 Yogyakarta	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
18	LKKS "BK3S" Provinsi D. I Yogyakarta - Badran Gg. Melati JT I/704 Bumijo Jetis Yogyakarta	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
19	Karang Taruna Propinsi DIY - Jl. Timoho Regency Kav.A-3 Muja Muju Yogyakarta	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
	Jumlah	508.600.000,00	508.600.000,00	100,00
II	Hibah Barang (Dana Keistimewaan)			
	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Lestari Budaya	320.000.000,00	303.825.665,00	94,95
1	KUBE Batik Shibori - Bokoharjo, Prambanan, Sleman		27.872.350,00	
2	KUBE Batik Tulis Pajimatan - Pajimatan, Imogiri, Bantul		30.521.700,00	
3	KUBE Blangkon - Wirobrajan, Yogyakarta		28.917.350,00	
4	KUBE Jemparingan - Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta		33.782.100,00	
5	KUBE Kerajinan Siwur - Kedungpoh, Nglipar, Gunung Kidul		33.870.815,00	
6	KUBE Ukir Kayu - Tegaltirto, Berbah, Sleman		31.223.500,00	
7	KUBE Sangkar Burung - Selang, Paliyan, Gunungkidul		29.108.750,00	
8	KUBE Kerajinan Perak - Sodo, Paliyan, Gunungkidul		30.710.900,00	

9	KUBE Batik Tulis Gulurejo - Gulurejo, Lendah, Kulon Progo		30.675.700,00	
10	KUBE Kerajinan Batik Kayu Bobung - Bobung, Putat, Patuk, Gunungkidul		27.142.500,00	
Jumlah Hibah Uang + Hibah Barang		828.600.000,00	812.425.665,00	98,05

3.1.2.3 Belanja Bantuan Sosial

Rp4.396.000.000,00

Rp0,00

Belanja Bantuan Sosial Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp4.396.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.396.000.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100
II	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	3.196.000.000,00	3.196.000.000,00	100
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	3.196.000.000,00	3.196.000.000,00	100
	Jumlah	4.396.000.000,00	4.396.000.000,00	100

Adapun rincian penerima Bantuan Sosial Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Rincian Penerima Bantuan Sosial

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti			
1	LKSA Krida Mulya	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
2	LKSA Wiyata Darma 1	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
3	LKSA Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00
4	Marsudi Putra II	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	Jumlah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
II	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti			
1	LKS ABH Prawoto	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
2	LKSA Mustika Tama	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
3	LKSA Rumah Alesha Panti Qurani	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
4	TAS Annisa	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
5	TAS An Nur Cahaya Umat	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00

6	TAS Assalam	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
7	TAS Qonita	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
8	TAS Syifaul Qulub	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
9	TPA Beringharjo	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
10	Yayasan Sahabat Manusia Pembutuh Cinta	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
11	LKSA Ash Siddiqiyah	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
12	LKSA Bintang Sa'adilah Arrosyid	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
13	LKSA Abdul Alim	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
14	LKSA Al Barokah Sleman	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
15	LKSA Al Ghifari	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
16	LKSA Al Hikmah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
17	LKSA Al Ikhlas	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
18	LKSA Al Islam	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
19	LKSA Amanah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
20	LKSA Bina Insani	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
21	LKSA Bina Putra	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
22	LKSA Binnausaadah	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
23	LKSA Darul Aitam	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
24	LKSA Darussubusi	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
25	LKSA Islam Playen	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
26	LKSA Muhammadiyah Nanggulan	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
27	LKSA Muhammadiyah Wates	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
28	LKSA Nur Fadhillah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
29	LKSA Nurul Haq Madhania	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
30	LKSA Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Mafaza	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
31	LKSA Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
32	LKSA PAY Putra Islam Giwangan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
33	LKSA PAY Putra Muhammadiyah Yogyakarta	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
34	LKSA Santa Maria	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
35	LKSA Santo Thomas	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
36	LKSA Tunas Harapan Bala Keselamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
37	LKSA Yapitu Al Huda Pucung	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
38	LKSA Yayasan Panti Asuhan Islam Ibadah Bunda	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
39	LKSA Yayasan Panti Asuhan Yatim Putri Islam RM Suryowinoto	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
40	LKSA Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
41	LKSA Zuhriyah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
42	LKSA Diponegoro	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
43	LKSA Mambaul Hisan	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00

44	LKSA Sang Timur	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
45	LKSA Al Barokah Prambanan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
46	LKSA Darul Ilmi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
47	LKSA Mekar Melati	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
48	LKSA Rumah Sejahtera	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	Jumlah	545.000.000,00	545.000.000,00	100,00
III	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			
1	LKS Budhi Mulya	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
2	Orsos Adhi Yuswo	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
3	Klp. LU Setaman	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
4	Klp. LU Mulya Abadi	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
5	LKS. Cempaka	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
6	LKS Sekaringtyas	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00
7	Posyandu LU Khusnul Khotimah	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
8	Kelompok Lansia Ismoyo	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
9	Orsos Melati	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
10	Klp. Lansia Sedyo Rahayu	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
11	Komdes Wukirsari	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
12	Orsos As-Salaam	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
13	Yayasan Pondok Pesantren Modern Yatim dan Dhuafa MADANIA	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
14	LKS. Maju Sejahtera	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
15	Klp. LU Pendowo Maju	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
16	Klp. LU Tresno Mulya	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
17	Orsos Langgeng	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
18	LKS. Baitunnajah	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
19	Klp. Lansia Sedulur	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
20	Yysn. Bina Insan Madani	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
21	Lembaga Pemerhati Lingkungan Yogyakarta	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
22	Klp. LU Mulya Sejati	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
23	Klp. LU Sari Manunggal	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
24	LKS Kinasih	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00
25	Orsos Ngudi Mulyo	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
26	LKS Laku Utomo	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
27	Orsos Guyub	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
28	Orsos Setyo Manunggal	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
29	Orsos Mekar Sari	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00
30	LKS An Nur Srimpi	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00

31	LKS. Raharja Kedungkeris	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
32	Orsos Melati	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
33	Orsos Pelita Kasih	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
34	LKS Suko Manunggal	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
35	BKM Taman Sejahtera	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
36	LKS. Tirtowening	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
	Jumlah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00
IV	Dana Keistimewaan			
1	LKSA Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Mafaza	445.500.000,00	445.500.000,00	100,00
2	LKSA Al Dzikro	742.500.000,00	742.500.000,00	100,00
3	LKSA Al Ikhlas	301.500.000,00	301.500.000,00	100,00
4	LKSA Almarina	433.500.000,00	433.500.000,00	100,00
5	LKSA Daarul 'Ilmi	678.000.000,00	678.000.000,00	100,00
	Jumlah	2.601.000.000,00	2.601.000.000,00	100,00
	Jumlah	4.396.000.000,00	4.396.000.000,00	100,00

3.1.2.4 Belanja Modal

Rp3.917.389.059,00

Rp2.668.534.421,00

Realisasi Belanja Modal Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp3.917.389.059,00 atau 88,98% dari anggaran sebesar Rp4.402.405.517,00. Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.248.854.638,00 atau 46,80% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2020 yaitu sebesar Rp2.668.534.421,00.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

3.1.2.4.1 Belanja Modal Tanah

Rp0,00

Rp0,00

Belanja Modal Tanah Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00.

3.1.2.4.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp676.437.400,00

Rp2.181.335.841,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp679.293.640,00 dan realisasi sebesar Rp676.437.400,00 atau 99,58% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.81 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I	Belanja Modal Alat Besar			
a	Belanja Modal Alat Bantu	26.152.000,00	26.072.000,00	99,69
	Jumlah	26.152.000,00	26.072.000,00	99,69
II	Belanja Modal Alat Angkutan			

a	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.200.000,00	1.200.000,00	100
	Jumlah	1.200.000,00	1.200.000,00	100
III	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga			
a	Belanja Modal Alat Kantor	226.070.840,00	224.776.400,00	99,43
b	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	159.867.000,00	159.329.000,00	99,66
	Jumlah	385.937.840,00	384.105.400,00	99,53
IV	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar			
a	Belanja Modal Alat Studio	55.533.800,00	54.986.000,00	99,01
b	Belanja Modal Alat Komunikasi	13.350.000,00	13.350.000,00	100
	Jumlah	68.883.800,00	68.336.000,00	99,20
V	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan			
a	Belanja Modal Alat Kedokteran	4.862.000,00	4.862.000,00	100
b	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	49.446.000,00	49.446.000,00	100
	Jumlah	54.308.000,00	54.308.000,00	100
VI	Belanja Modal Komputer			
a	Belanja Modal Komputer Unit	110.866.000,00	110.500.000,00	99,67
b	Belanja Modal Peralatan Komputer	23.498.000,00	23.468.000,00	99,87
	Jumlah	134.364.000,00	133.968.000,00	99,71
VII	Belanja Modal Alat Eksplorasi			
a	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	8.448.000,00	8.448.000,00	100
	Jumlah	8.448.000,00	8.448.000,00	100
	Jumlah	679.293.640,00	676.437.400,00	99,58

Adapun rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Sosial Induk dan UPTD sebagai berikut:

Tabel 3.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin di Dinas Sosial Induk dan UPTD

No	Unit	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Dinas Sosial (Induk)	46.636.000,00	46.450.000,00	99,60
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	7.920.000,00	7.920.000,00	100
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	117.735.000,00	117.715.000,00	99,98
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	89.283.800,00	88.656.000,00	99,30
5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	302.618.840,00	301.291.400,00	99,56
6	Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	30.266.000,00	30.266.000,00	100
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	84.834.000,00	84.139.000,00	99,18
	Jumlah	679.293.640,00	676.437.400,00	99,58

3.1.2.4.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp3.220.290.859,00

Rp450.367.580,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp3.701.827.877,00 dan realisasi sebesar Rp3.220.290.859,00 atau 86,99% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.13 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I	Belanja Modal Bangunan Gedung			
a	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	17.500.000,00	17.500.000,00	100
b	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.684.327.877,00	3.202.790.859,00	86,93
	Jumlah	3.701.827.877,00	3.220.290.859,00	86,99

Adapun rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Sosial Induk dan UPTD sebagai berikut:

Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan di Dinas Sosial Induk dan UPTD

No	Unit	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Dinas Sosial (Induk)	-	-	-
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	-	-	-
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	-	-	-
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	2.979.441.877,00	2.655.696.823,00	89,13
5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	704.886.000,00	547.094.036,00	77,61
6	Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	17.500.000,00	17.500.000,00	100
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	-	-	-
	Jumlah	3.701.827.877,00	3.220.290.859,00	86,99

3.1.2.4.4 Belanja Modal, Jaringan dan Irigasi

Rp0,00

Rp30.931.000,00

Belanja Modal Modal, Jaringan dan Irigasi pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00.

3.1.2.4.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Rp20.660.800,00

Rp5.900.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp21.284.000,00 dan realisasi sebesar Rp20.660.800,00 atau 97,07% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga			
a	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	21.284.000,00	20.660.800,00	97,07
	Jumlah	21.284.000,00	20.660.800,00	97,07

Adapun rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Dinas Sosial Induk dan UPTD sebagai berikut:

Tabel 3.16 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya di Dinas Sosial Induk dan UPTD

No	Unit	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Dinas Sosial (Induk)	-	-	-
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	-	-	-
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	-	-	-
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	-	-	-
5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	-	-	-
6	Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	-	-	-
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	21.284.000,00	20.660.800,00	97,07
	Jumlah	21.284.000,00	20.660.800,00	97,07

3.1.2.4.6 Belanja Modal Aset Lainnya**Rp0,00****Rp0,00**

Belanja Modal Aset Lainnya pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00.

3.1.2.5 Belanja Dana Keistimewaan**Rp5.526.693.473,84****Rp2.082.845.270,00**

Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021 sebesar Rp103.085.207.542,00 dan realisasi sebesar Rp89.699.907.923,04 di dalamnya termasuk anggaran dan realisasi belanja yang sumber dananya dari Dana Keistimewaan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Belanja Dana Keistimewaan Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial pada tahun 2021 yaitu: anggaran sebesar Rp5.914.647.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.526.693.473,84 atau 93,84%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.17 Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I	Belanja Operasi			

a	Belanja Barang dan Jasa	2.947.011.000,00	2.575.417.808,84	87,39
b	Belanja Hibah	320.000.000,00	303.825.665,00	94,94
c	Belanja Bantuan Sosial	2.601.000.000,00	2.601.000.000,00	100
	Jumlah	5.868.011.000,00	5.480.243.473,84	93,39
II	Belanja Modal			
a	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.636.000,00	46.636.000,00	100
	Jumlah	46.636.000,00	46.636.000,00	100
	Jumlah	5.914.647.000,00	5.526.693.473,84	93,44

3.2. RINCIAN DAN PENJELASAN NERACA

	2021	2020 (Audited)
3.2.1 Aset	Rp95.259.735.237,19	Rp94.442.556.742,27
3.2.1.1 Aset Lancar	Rp1.591.490.540,00	Rp590.896.470,50,00
3.2.1.1.1 Persediaan	Rp1.591.490.540,50	Rp590.896.470,50

Saldo Persediaan sebesar Rp1.591.490.540,50 terdiri dari persediaan barang pakai habis dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.18 Rincian Persediaan Dinas Sosial

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	Barang Pakai Habis		
1	Bahan Kimia	3.062.410,00	643.940,00
2	Bahan Bakar dan Pelumas	67.795.750,00	56.609.500,00
3	Isi Tabung Gas	310.000,00	465.000,00
4	Bahan Lainnya	890.458.984,50	59.434.272,50
5	Suku Cadang Alat Angkutan	961.000,00	0,00
6	Suku Cadang Alat Bengkel	3.372.000,00	7.686.000,00
7	Alat Tulis Kantor	24.424.950,00	27.417.050,00
8	Kertas dan Cover	8.334.000,00	6.754.000,00
9	Bahan Cetak	335.750,00	250.000,00
10	Benda Pos	170.000,00	390.000,00
11	Bahan Komputer	1.453.000,00	3.793.000,00
12	Perabot Kantor	60.292.000,00	36.447.910,00
13	Alat Listrik	36.922.125,00	38.953.700,00
14	Perlengkapan Dinas	1.655.500,00	5.837.140,00
15	Perlengkapan Pendukung Olahraga	561.000,00	2.566.300,00
16	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	485.112.636,60	328.367.452,00

17	Obat	2.933.570,00	6.238.620,00
18	Natura	3.335.864,40	9.042.586,00
	Jumlah	1.591.490.540,50	590.896.470,50

Adapun rincian Saldo Persediaan pada Dinas Sosial Induk dan UPTD sebagai berikut:

Tabel 3.19 Saldo Persediaan di Dinas Sosial Induk dan UPTD

No	Unit	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Sosial (Induk)	975.323.690,00	90.719.600,00
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	370.132.674,50	302.090.945,00
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	27.051.880,00	7.420.677,50
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	192.295.790,00	112.943.518,00
5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	12.971.225,00	30.870.250,00
6	Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	6.168.750,00	25.661.860,00
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	7.546.531,00	21.189.620,00
	Jumlah	1.591.490.540,50	590.896.470,50

	2021	2020 (audited)
3.2.1.2 Aset Tetap	Rp93.428.501.612,69	Rp93.412.672.187,77

Aset Tetap Dinas Sosial per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp93.428.501.612,69 merupakan nilai buku aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp147.122.220.491,32 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp53.693.718.878,63 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.20 Aset Tetap Dinas Sosial

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Tanah	18.705.829.406,00	18.720.829.406,00
2	Peralatan dan Mesin	28.319.319.398,00	27.472.254.938,08
3	Gedung dan Bangunan	97.464.049.920,82	93.487.735.788,65
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.715.679.679,50	1.300.199.007,67
5	Aset Tetap Lainnya	579.686.587,00	559.025.787,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	337.655.500,00	484.557.500,00
7	Akumulasi Penyusutan	(53.693.718.878,63)	(48.611.930.239,63)
	Jumlah	93.428.501.612,69	93.412.672.187,77

3.2.1.2.1 Tanah	Rp18.705.829.406,00	Rp18.720.829.406,00
------------------------	----------------------------	----------------------------

Saldo Aset Tetap Tanah sebesar Rp18.705.829.406,00 diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Rincian Aset Tetap - Tanah

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Tanah	18.705.829.406,00
	Jumlah	18.705.829.406,00

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2021 pada Dinas Sosial Induk dan UPTD sebagai berikut:

Tabel 3.22 Rincian Tanah Dinas Sosial dan UPTD

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Dinas Sosial (Induk)	13.402.876.916,00
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	0,00
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	42.584.000,00
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	3.706.896.000,00
5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	20.073.650,00
6	Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	1.326.722.840,00
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	206.676.000,00
	Jumlah	18.705.829.406,00

Mutasi Tanah sebagai berikut:

Tabel 3.23 Mutasi Tanah

No	Uraian	2020 (Rp)	Mutasi (Rp)		2021 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1	Tanah	18.534.559.406,00	0,00	15.000.000,00	18.519.559.406,00
	Jumlah	18.534.559.406,00	0,00	15.000.000,00	18.519.559.406,00

Tanah berkurang Rp15.000.000,00 disebabkan adanya mutasi ke BPKA, yaitu Tanah untuk Depo Arsip Dinas Sosial Induk yang berlokasi di Lempuyangan.

3.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin**Rp28.319.319.398,00****Rp27.472.254.938,08**

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp28.319.319.398,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.24 Rincian Aset Tetap - Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Alat Besar	1.091.334.000,00
2	Alat Angkutan	7.220.220.408,31
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	680.253.520,00

4	Alat Pertanian	192.531.944,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.547.333.659,77
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.264.199.385,87
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.027.579.507,16
8	Alat Laboratorium	339.760.500,00
9	Komputer	2.900.426.560,89
10	Alat Keselamatan Kerja	19.850.000,00
11	Peralatan Olahraga	35.829.912,00
	Jumlah	28.319.319.398,00

Adapun rincian saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 di Dinas Sosial dan UPTD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25 Peralatan dan Mesin Dinas Sosial dan UPTD

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Dinas Sosial Induk	7.951.216.528,33
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	7.161.931.242,00
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	1.770.150.420,00
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	3.045.671.005,84
5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	2.264.822.267,00
6	Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	2.852.901.120,00
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	3.272.626.814,83
	Jumlah	28.319.319.398,00

Mutasi Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel 3.26 Mutasi Peralatan dan Mesin

No	Uraian	2020 (Rp)	Mutasi (Rp)		2021 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1	Alat Besar	1.073.869.000,00	31.477.000,00	14.012.000,00	1.091.334.000,00
2	Alat Angkutan	7.219.020.408,31	193.700.000,00	192.500.000,00	7.220.220.408,31
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	674.161.520,00	6.092.000,00	0,00	680.253.520,00
4	Alat Pertanian	177.775.000,00	14.756.944,00	0,00	192.531.944,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.066.320.949,84	555.079.710,00	74.067.000,07	10.547.333.659,77
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.199.807.446,88	89.391.939,00	25.000.000,01	1.264.199.385,87
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.962.445.507,16	113.258.000,00	48.124.000,00	4.027.579.507,16
8	Alat Laboratorium	337.936.500,00	1.824.000,00	0,00	339.760.500,00

9	Komputer	2.708.538.605,89	201.174.955,00	9.287.000,00	2.900.426.560,89
10	Alat Keselamatan Kerja	19.850.000,00	0,00	0,00	19.850.000,00
11	Alat Eksplorasi	0,00	8.448.000,00	8.448.000,00	0,00
12	Peralatan Olahraga	32.530.000,00	3.299.912,00	0,00	35.829.912,00
	Jumlah	27.472.254.938,08	1.218.502.460,00	371.438.000,08	28.319.319.398,00

Penjelasan mutasi Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2021	27.472.254.938,08
Penambahan:	
Belanja Modal:	676.437.400,00
Dinas Sosial Induk	46.450.000,00
BRTPD	7.920.000,00
BPRSW	117.715.000,00
BRBKL	88.656.000,00
BPRSR	301.291.400,00
BRSPA	30.266.000,00
BPSTW	84.139.000,00
Hibah:	21.551.000,00
Dinas Sosial Induk - terima dari BPD DIY	21.551.000,00
Reklas dari Persediaan:	152.219.060,00
Dinas Sosial Induk	91.687.900,00
BRTPD	13.849.660,00
BPRSW	11.965.000,00
BPRSR	6.480.000,00
BRSPA	12.924.000,00
BPSTW	15.312.500,00
Mutasi Masuk:	195.000.000,00
BRSPA - Alat Angkutan dari Dinas Sosial Induk	192.500.000,00
Dinas Sosial Induk - Alat Pertanian dari BPBD	2.500.000,00
Reklas dari Beban:	42.760.000,00
Dinas Sosial Induk - dari Beban Pemeliharaan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	12.000.000,00
BPRSW - dari Beban pemeliharaan Gedung Kantor	25.510.000,00
BPRSW - dari Beban Jasa Tenaga Keamanan	5.250.000,00
Reklas Antar Rekening Aset Tetap:	17.500.000,00
BRSPA - dari Gedung dan Bangunan (Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya)	17.500.000,00
Reklas Antar Rekening Peralatan dan Mesin:	107.630.000,00
- Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.092.000,00
BRSPA - dari Alat Besar	6.092.000,00
- Alat Kantor dan Rumah Tangga	43.602.000,00
BRTPD - dari Alat Besar	7.920.000,00
BPRSW - dari Alat Eksplorasi Geofisika	8.448.000,00
BPRSW - dari Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	25.000.000,00
BPRSW - dari Komputer	2.234.000,00
- Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.556.000,00
BPSTW - dari Komputer	6.900.000,00
BPRSW - dari Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.656.000,00
- Alat Laboratorium	1.824.000,00
Dinas Sosial Induk - dari Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.824.000,00
- Komputer	43.556.000,00
Dinas Sosial Induk - dari Alat Kantor dan Rumah Tangga	43.556.000,00
Total Penambahan:	1.213.097.460,00
Pengurangan:	
Penyesuaian Saldo Awal:	0,08
- Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,07

Dinas Sosial Induk	0,06
BRSBKL	0,01
- Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,01
Dinas Sosial Induk	0,01
Mutasi Keluar:	192.500.000,00
Dinas Sosial Induk - Alat Angkutan (Mobil ambulance) ke BRSPA	192.500.000,00
Reklas ke Persediaan:	47.704.000,00
BRSBKL	47.704.000,00
Reklas ke Ekstrakomtabel:	18.199.000,00
- Alat Kantor dan Rumah Tangga	17.626.000,00
Dinas Sosial Induk	1.213.500,00
BPRSW	8.300.000,00
BPSTW	8.112.500,00
- Alat Kedokteran dan Kesehatan	420.000,00
Dinas Sosial Induk	420.000,00
- Komputer	153.000,00
BPRSW	153.000,00
Reklas Antar Rekening Peralatan dan Mesin:	107.630.000,00
- Alat Besar	14.012.000,00
BRTPD - ke Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.920.000,00
BRSPA - ke Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.092.000,00
- Alat Kantor dan Rumah Tangga	51.036.000,00
Dinas Sosial Induk - ke Alat Laboratorium	1.824.000,00
Dinas Sosial Induk - ke Komputer	43.556.000,00
BPSTW - ke Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.656.000,00
- Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	25.000.000,00
BPRSW - ke Alat Kantor dan Rumah Tangga	25.000.000,00
- Komputer	9.134.000,00
BPRSW - ke Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.234.000,00
BPRSW - ke Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	6.900.000,00
- Alat Eksplorasi	8.448.000,00
BPRSW - ke Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.448.000,00
Total Pengurangan:	366.033.000,08
Saldo Akhir per 31 Desember 2021	28.319.319.398,00

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp28.319.319.398,00 termasuk di dalamnya penerimaan barang hibah dan mutasi masuk dari OPD lain, dengan rincian:

Tabel 3.27 Penerimaan Hibah

No	Uraian	Asal	Nama Barang	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	Hibah	Bank BPD DIY	PC Unit (Komputer)	21.551.000,00	Posko TAGANA
2	Mutasi dari OPD Lain	BPBD	Handsprayer (Alat Pertanian)	2.500.000,00	BTT

3.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Rp97.464.049.920,82

Rp93.487.735.788,65

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp97.464.049.920,82 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.28 Rincian Aset Tetap - Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bangunan Gedung	97.055.032.036,82
2	Monumen	82.288.140,00

3	Tugu Titik Kontrol/Pasti	326.729.744,00
	Jumlah	97.464.049.920,82

Adapun rincian saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 di Dinas Sosial dan UPTD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.29 Gedung dan Bangunan Dinas Sosial dan UPTD

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Dinas Sosial Induk	8.630.511.093,57
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	61.719.836.050,00
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	754.361.983,98
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRBKL)	10.906.607.604,00
5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	5.076.410.649,00
6	Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	6.034.978.740,27
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	4.341.343.800,00
	Jumlah	97.464.049.920,82

Mutasi Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 3.30 Mutasi Gedung dan Bangunan

No	Uraian	2020 (Rp)	Mutasi (Rp)		2021 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1	Bangunan Gedung	93.078.717.904,65	4.278.400.768,17	302.086.636,00	97.055.032.036,82
2	Monumen	82.288.140,00	0,00	0,00	82.288.140,00
3	Tugu Titik Kontrol/Pasti	326.729.744,00	0,00	0,00	326.729.744,00
	Jumlah	93.487.735.788,65	4.278.400.768,17	302.086.636,00	97.464.049.920,82

Penjelasan mutasi Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2021	93.487.735.788,65
Penambahan:	
Belanja Modal:	3.220.290.859,00
BRBKL	2.655.696.823,00
BPRSR	547.094.036,00
BRSPA	17.500.000,00
Reklas dari Beban/Kapitalisasi:	911.207.909,17
Dinas Sosial Induk - dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	272.612.254,17
BRTPD - dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	431.880.655,00
BRSPA - dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	197.200.000,00
BRSPA - dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur	9.515.000,00
Reklas dari KDP:	146.902.000,00
BRBKL	106.125.000,00
BPRSR	40.777.000,00
Total Penambahan:	4.278.400.768,17

Pengurangan:	
Reklas Antar Rekening Aset Tetap	302.086.636,00
BRSBKL - ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi (Bangunan Air-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku)	284.586.636,00
BPRSR - ke Peralatan dan Mesin (Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mebel)	17.500.000,00
Total Pengurangan:	302.086.636,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2021	97.464.049.920,82

3.2.1.2.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Rp1.715.679.679,50

Rp1.300.199.007,67

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp1.715.679.679,50 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.31 Rincian Aset Tetap - Jalan, Jaringan, dan Irigasi

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	291.668.000,00
2	Bangunan Air	940.488.973,50
3	Instalasi	233.031.256,00
4	Jaringan	250.491.450,00
	Jumlah	1.715.679.679,50

Adapun rincian saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2021 di Dinas Sosial dan UPTD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.32 Jalan, Jaringan, dan Irigasi Dinas Sosial dan UPTD

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Dinas Sosial Induk	953.946.087,50
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	119.271.000,00
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	93.455.000,00
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	387.687.892,00
5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	7.980.300,00
6	Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	34.425.000,00
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	118.914.400,00
	Jumlah	1.715.679.679,50

Mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagai berikut:

Tabel 3.33 Mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi

No	Uraian	2020 (Rp)	Mutasi (Rp)		2021 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1	Jalan dan Jembatan	291.668.000,00	0,00	0,00	291.668.000,00

2	Bangunan Air	525.008.301,67	415.480.671,83	0,00	940.488.973,50
3	Instalasi	233.031.256,00	0,00	0,00	233.031.256,00
4	Jaringan	250.491.450,00	0,00	0,00	250.491.450,00
	Jumlah	1.300.199.007,67	415.480.671,83	0,00	1.715.679.679,50

Penjelasan mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2021	1.300.199.007,67
Penambahan:	
Reklas dari Beban/Kapitalisasi:	130.894.035,83
Dinas Sosial Induk - dari Beban Pemeliharaan Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	19.700.000,00
Dinas Sosial Induk - dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	51.194.035,83
BPRSW - dari Beban Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	60.000.000,00
Reklas Antar Rekening Aset Tetap	284.586.636,00
BRSBKL - dari Gedung dan Bangunan (Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya)	284.586.636,00
Total Penambahan:	415.480.671,83
Pengurangan:	0,00
-	-
Total Pengurangan:	0,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2021	1.715.679.679,50

3.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Rp579.686.587,00

Rp559.025.787,00

Saldo Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya sebesar Rp579.686.587,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.34 Rincian Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	102.263.242,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	477.423.345,00
	Jumlah	579.686.587,00

Adapun rincian saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 di Dinas Sosial dan UPTD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.35 Aset Tetap Lainnya Dinas Sosial dan UPTD

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Dinas Sosial Induk	23.102.000,00
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	38.751.000,00
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	76.909.460,00
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	169.019.327,00
5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	45.656.000,00

6	Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	60.806.000,00
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	165.442.800,00
	Jumlah	579.686.587,00

Mutasi Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

Tabel 3.36 Mutasi Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	2020 (Rp)	Mutasi (Rp)		2021 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1	Bahan Perpustakaan	102.263.242,00	0,00	0,00	102.263.242,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	456.762.545,00	20.660.800,00	0,00	477.423.345,00
	Jumlah	559.025.787,00	20.660.800,00	0,00	579.686.587,00

Penjelasan mutasi Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2021	559.025.787,00
Penambahan:	
Belanja Modal:	20.660.800,00
BPSTW	20.660.800,00
Total Penambahan:	20.660.800,00
Pengurangan:	0,00
-	-
Total Pengurangan:	0,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2021	579.686.587,00

3.2.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp337.655.500,00

Rp484.557.500,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp337.655.500,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.37 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	337.655.500,00
	Jumlah	579.686.587,00

Adapun rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 di Dinas Sosial dan UPTD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.38 Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Sosial dan UPTD

No	Unit	Nilai Per 31-12-2021 (Rp)	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)
1	Dinas Sosial Induk	61.022.000,00	61.022.000,00

2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	41.937.500,00	41.937.500,00
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	70.170.000,00	70.170.000,00
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRBKL)	0,00	106.125.000,00
5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	10.010.000,00	10.010.000,00
6	Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	138.952.000,00	138.952.000,00
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	15.564.000,00	15.564.000,00
	Jumlah	337.655.500,00	443.780.500,00

Tabel 3.39 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Uraian	2020 (Rp)	Mutasi (Rp)		2021 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	443.780.500,00	0,00	106.125.000,00	337.655.500,00
	Jumlah	443.780.500,00	0,00	106.125.000,00	337.655.500,00

Penjelasan mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2021	443.780.500,00
Penambahan:	0,00
-	-
Total Penambahan:	0,00
Pengurangan:	
Reklas ke Gedung dan Bangunan:	106.125.000,00
BRBKL	106.125.000,00
Total Pengurangan:	106.125.000,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2021	337.655.500,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp337.655.500,00 merupakan DED dari saldo tahun 2020 yang belum terlaksana pembangunannya hingga akhir tahun 2021.

3.2.1.2.7 Akumulasi Penyusutan Rp(53.693.718.878,63) Rp(48.611.930.239,63)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp(53.693.718.878,63) merupakan pengakuan akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.40 Rincian Akumulasi Penyusutan

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(24.843.692.694,35)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(28.069.792.535,99)
4	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(553.125.629,97)
5	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(227.108.018,32)
	Jumlah	(53.693.718.878,63)

Adapun rincian saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 di Dinas Sosial dan UPTD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.41 Akumulasi Penyusutan Dinas Sosial dan UPTD

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Dinas Sosial Induk	(10.990.435.433,05)
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	(21.676.005.786,17)
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	(1.657.389.977,34)
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	(5.367.675.599,64)
5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	(4.417.261.232,50)
6	Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	(5.226.311.191,34)
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	(4.358.639.658,59)
	Jumlah	(53.693.718.878,63)

3.2.1.3 Aset Lainnya

Rp239.743.084,00

Rp438.988.084,00

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp239.743.084,00 merupakan aset di Dinas Sosial induk yang meliputi Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-lain, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.42 Rincian Aset Lainnya

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.950.084,00
2	Aset Tidak Berwujud	136.166.000,00
3	Aset Lain-lain	100.627.000,00
	Jumlah	239.743.084,00

3.2.1.3.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Rp2.950.084,00

Rp2.950.084,00

Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.950.084,00 merupakan nilai tercatat Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dengan harga perolehan sebesar Rp2.950.084,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.43 Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga–Sewa	2.950.084,00
	Jumlah	2.950.084,00

Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa merupakan aset Dinas Sosial Induk berupa Tanah dan Bangunan Eks Rumah Dinas di Jl. Munggur 32, Yogyakarta yang disewa oleh BUKP Gondokusuman, Yogyakarta. Adapun perjanjian sewa dengan BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.2.1.3.2 Aset Tak Berwujud **Rp136.166.000,00** **Rp36.966.000,00**

Saldo Aset Tak Berwujud sebesar Rp136.166.000,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.44 Rincian Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Software	136.166.000,00
	Jumlah	136.166.000,00

Saldo Aset Tak Berwujud senilai Rp136.166.000,00 merupakan software di Dinas Sosial Induk, dengan rincian mutasi:

Tabel 3.45 Mutasi Aset Tak Berwujud

No	Uraian	2020 (Rp)	Mutasi (Rp)		2021 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1	Software	36.966.000,00	99.200.000,00	0,00	136.166.000,00
	Jumlah	36.966.000,00	99.200.000,00	0,00	136.166.000,00

Penjelasan mutasi Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2021	36.966.000,00
Penambahan:	
Reklas dari Beban:	99.200.000,00
Dinas Sosial Induk	99.200.000,00
Total Penambahan:	99.200.000,00
Pengurangan:	0,00
-	-
Total Pengurangan:	0,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2021	136.166.000,00

Penambahan Aset Tetap Tak Berwujud senilai Rp99.200.000,00 merupakan reklas dari Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus berupa jasa pembuatan software pemeringkatan Data Kesejahteraan Sosial Daerah.

3.2.1.3.3 Aset Lain-lain **Rp100.627.000,00** **Rp399.072.000,00**

Saldo Aset Lain-lain sebesar Rp100.627.000,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.46 Rincian Aset Lain-lain

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Aset Rusak Berat/Usang	100.627.000,00
	Jumlah	100.627.000,00

Aset Lain-lain merupakan Aset Rusak Berat/Usang per 31 Desember 2021 di Dinas Sosial Induk sebesar Rp100.627.000,00 adalah nilai buku aset lain-lain dengan nilai perolehan sebesar Rp769.855.300,00 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp663.238.300,00.

		2020 (audited)
3.2.2 Kewajiban	Rp75.386.718,00	Rp76.409.211,00

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp75.386.718,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	Rp75.386.718,00	Rp76.409.211,00
--	------------------------	------------------------

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp75.386.718,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.2.2.1.1 Utang Belanja	Rp75.386.718,00	Rp76.409.211,00
--------------------------------	------------------------	------------------------

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp75.376.718,00 merupakan beban Dinas Sosial atas pemakaian barang atau jasa sampai dengan 31 Desember 2021 tetapi belum dibayar oleh Dinas Sosial dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.47 Rincian Utang Belanja

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
I	Utang Belanja Barang dan Jasa	
	a. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	5.843.512,00
	b. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	7.956.250,00
	c. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	60.977.156,00
	d. Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	599.800,00
	Jumlah	75.376.718,00

Adapun rincian saldo Utang Belanja per 31 Desember 2021 di Dinas Sosial dan UPTD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.48 Utang Belanja Dinas Sosial Induk dan UPTD

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Dinas Sosial Induk	

	a. Tagihan Telepon	2.997.094,00
	b. Tagihan Air	3.893.000,00
	c. Tagihan Listrik	21.430.839,00
	d. Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00
	Jumlah	28.320.933,00
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	
	a. Tagihan Telepon	118.395,00
	b. Tagihan Air	0,00
	c. Tagihan Listrik	12.868.265,00
	d. Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	599.800,00
	Jumlah	13.586.460,00
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	
	a. Tagihan Telepon	60.904,00
	b. Tagihan Air	0,00
	c. Tagihan Listrik	5.394.752,00
	d. Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00
	Jumlah	5.455.656,00
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRBKL)	
	a. Tagihan Telepon	569.290,00
	b. Tagihan Air	1.676.900,00
	c. Tagihan Listrik	6.336.810,00
	d. Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00
	Jumlah	8.583.000,00
5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	
	a. Tagihan Telepon	381.120,00
	b. Tagihan Air	0,00
	c. Tagihan Listrik	3.472.509,00
	d. Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00
	Jumlah	3.853.629,00
6	Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	
	a. Tagihan Telepon	778.309,00
	b. Tagihan Air	2.337.350,00
	c. Tagihan Listrik	4.267.400,00
	d. Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00
	Jumlah	7.383.059,00
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	
	a. Tagihan Telepon	938.400,00
	b. Tagihan Air	49.000,00

	c. Tagihan Listrik	7.206.581,00
	d. Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00
	Jumlah	8.193.981,00
	Jumlah	75.376.718,00

3.2.3 Ekuitas

Rp95.184.358.519,19

Rp94.366.147.531,27

Saldo Ekuitas Dinas Sosial DIY Rp95.184.358.519,19 merupakan kekayaan bersih Dinas Sosial DIY yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Dinas Sosial DIY pada tanggal 31 Desember 2021. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti penyesuaian Saldo Awal Aset Tetap, Pencatatan ke Ekstrakomtabel, penghapusan Aset Tetap dan lain-lain. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp95.184.358.519,19 mengalami kenaikan sebesar Rp818.210.987,92 atau 0,87% dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp94.366.147.531,27.

3.3 RINCIAN DAN PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

3.3.1 Pendapatan-LO

Rp409.751.000,00

Rp532.200.000,00

Pendapatan LO Tahun 2021 sebesar Rp409.751.000,00 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Rp388.200.000,00

Rp532.200.000,00

Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2021 Dinas Sosial sebesar Rp388.200.000,00 merupakan Pendapatan Retribusi Daerah – LO dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1.1.1 Retribusi Daerah-LO

Rp388.200.000,00

Rp532.200.000,00

Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2021 sebesar Rp388.200.000,00 adalah Pendapatan Retribusi Jasa Usaha yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Retribusi Pemakaian Ruangan. Pendapatan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp144.000.000,00 dari pendapatan tahun lalu sebesar Rp532.200.000,00 atau sebesar 27,06%. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.49 Pendapatan Dinas Sosial Induk dan UPTD

No	Unit	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Sosial Induk	4.200.000,00	4.200.000,00
2	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	384.000.000,00	528.000.000,00
	Jumlah	388.200.000,00	532.200.000,00

Pendapatan Dinas Sosial tersebut berasal dari sewa tempat untuk kantin dan fotokopi di Dinas Sosial Induk, dan sewa Ruang/kamar untuk klien di BPSTW.

3.3.1.2 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO **Rp21.551.000,00** **Rp0,00**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO sebesar Rp21.551.000,00 merupakan Pendapatan Hibah yang diterima Dinas Sosial pada Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1.2.1 Pendapatan Hibah-LO **Rp21.551.000,00** **Rp0,00**

Pada tahun 2021 Dinas Sosial mendapatkan hibah barang berupa Komputer Unit yang berasal dari Bank BPD DIY senilai Rp21.551.000,00 yang digunakan untuk Posko Tagana Inti Dinas Sosial DIY.

3.3.2 Beban **Rp88.592.145.690,66** **Rp62.429.508.117,94**

Realisasi Beban Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp88.592.145.690,66 merupakan penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran, dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut:

3.3.2.1 Beban Operasi **Rp83.492.315.296,04** **Rp58.901.068.189,52**

Realisasi Beban Operasi Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp83.492.315.296,04 terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah dan Beban Bantuan Sosial, dengan rincian sebagai berikut:

3.3.2.1.1 Beban Pegawai **Rp35.638.179.721,00** **Rp25.090.556.269,00**

Realisasi Beban Pegawai Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp35.638.179.721,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.50 Rincian Beban Pegawai

No	Unit	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	20.835.205.147,00	24.566.020.269,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	14.515.468.574,00	0,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	287.506.000,00	524.536.000,00
	Jumlah	35.638.179.721,00	25.090.556.269,00

Adapun rincian Beban Pegawai Dinas Sosial Induk dan UPTD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.51 Beban Pegawai Dinas Sosial Induk dan UPTD

No	Unit	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Sosial Induk	21.614.359.657,00	10.804.507.153,00
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	3.016.923.138,00	3.062.178.138,00
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	1.539.378.001,00	1.413.703.428,00
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	2.504.731.020,00	2.862.752.684,00

5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	1.860.386.700,00	1.694.817.203,00
6	Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	2.501.375.648,00	2.615.906.982,00
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	2.601.025.557,00	2.636.690.681,00
	Jumlah	35.638.179.721,00	25.090.556.269,00

3.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Rp42.645.709.910,04

Rp33.810.511.920,52

Realisasi Beban Barang dan Jasa Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp42.645.709.910,04 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.52 Rincian Beban Barang dan Jasa

No	Unit	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Beban Barang	19.869.280.167,00	17.835.829.420,50
2	Beban Jasa	19.139.428.955,00	13.205.496.136,00
3	Beban Pemeliharaan	1.651.151.056,04	1.252.973.966,02
4	Beban Perjalanan Dinas	1.635.924.732,00	1.386.712.398,00
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	349.925.000,00	129.500.000,00
	Jumlah	42.645.709.910,04	33.810.511.920,52

Adapun rincian Beban Barang dan Jasa Dinas Sosial Induk dan UPTD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.53 Beban Barang dan Jasa Dinas Sosial Induk dan UPTD

No	Unit	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Sosial Induk	20.419.184.354,04	11.895.725.603,00
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	4.070.896.614,50	4.312.687.628,00
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	2.775.117.493,50	2.474.458.432,52
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	5.839.628.124,00	5.654.312.326,00
5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	2.637.842.508,00	2.450.544.653,00
6	Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	2.941.818.631,00	3.093.238.071,00
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	3.961.222.185,00	3.929.545.207,00
	Jumlah	42.645.709.910,04	33.810.511.920,52

3.3.2.1.3 Beban Hibah

Rp4.396.000.000,00

Rp0,00

Realisasi Beban Hibah Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp812.425.665,00 merupakan hibah kepada Kelompok Masyarakat yang terdiri dari hibah uang sebesar Rp508.600.000,00 dan hibah barang sebesar Rp303.825.665,00. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.54 Rincian Beban Hibah

No	Unit	Hibah Uang (Rp)	Hibah Barang (Rp)	Total Hibah (Rp)
1	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	176.600.000,00	0,00	176.600.000,00
2	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	286.000.000,00	303.825.665,00	589.825.665,00
	Jumlah	508.600.000,00	303.825.665,00	812.425.665,00

3.3.2.1.4 Beban Bantuan Sosial**Rp4.396.000.000,00****Rp0,00**

Realisasi Beban Bantuan Sosial Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.396.000.000,00 merupakan Beban Bantuan Sosial untuk program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan anak bermasalah sosial dan pelayanan dan perlindungan lanjut usia terlantar.

3.3.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi**Rp5.099.830.394,62****Rp3.528.439.928,42**

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.099.830.394,62 dengan rincian Beban Penyusutan sebesar Rp5.099.830.394,62 dan Amortisasi Rp0,00. Rincian Beban Penyusutan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.55 Beban Penyusutan Dinas Sosial

No	Unit	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.295.917.544,50	1.576.924.972,99
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.720.989.931,05	1.885.962.312,29
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	72.077.652,41	56.510.976,46
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	10.845.266,66	9.041.666,68
	Jumlah	5.099.830.394,62	3.528.439.928,42

Adapun rincian Beban Penyusutan Dinas Sosial Induk dan UPTD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.56 Beban Penyusutan Dinas Sosial Induk dan UPTD

No	Unit	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Sosial Induk	1.350.933.889,89	612.444.410,64
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	1.496.781.577,11	1.410.791.009,53
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	175.060.362,74	223.626.827,63

4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	383.954.745,66	374.438.783,03
5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	786.543.763,48	293.830.018,00
6	Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	591.000.562,07	298.543.647,59
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	315.555.493,67	314.765.232,00
	Jumlah	5.099.830.394,62	3.528.439.928,42

3.3.3 Surplus/Defisit –LO

Rp(88.182.394.690,66)

Rp(61.897.308.117,94)

Surplus/Defisit-LO sebesar Rp(88.182.394.690,66) berasal dari Pendapatan-LO sebesar Rp409.751.000,00 dikurangi dengan Beban sebesar Rp88.592.145.690,66. Pendapatan-LO terdiri dari Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp388.200.000,00 dan Pendapatan Hibah sebesar Rp21.551.000,00.

3.4 RINCIAN DAN PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas berisi informasi tentang Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, serta Ekuitas Akhir. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut:

3.4.1 Ekuitas Awal

Rp94.366.147.531,27

Rp94.565.366.637,84

Saldo Ekuitas Awal Tahun 2021 sebesar Rp94.366.147.531,27 mengalami penurunan sebesar Rp199.219.106,57 atau 0,21% dibandingkan dengan Ekuitas Awal Tahun 2020 yaitu sebesar Rp94.565.366.637,84. Rincian Ekuitas Awal sebesar Rp94.366.147.531,27 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.57 Rincian Ekuitas Awal Dinas Sosial Induk dan UPTD

No	Unit	Ekuitas Awal (Rp)
1	Dinas Sosial Induk	21.424.508.750,29
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	48.736.731.317,00
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	1.115.665.637,88
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	10.637.401.180,86
5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	2.967.471.201,99
6	Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	5.505.352.979,41
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	3.979.016.463,84
	Jumlah	94.366.147.531,27

3.4.2 Surplus/Defisit

Rp(88.182.394.690,66)

Rp(61.897.308.117,94)

Surplus/Defisit LO Tahun 2021 sebesar Rp(88.182.394.690,66) merupakan Surplus/Defisit LO Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.58 Rincian Surplus (Defisit)-LO Dinas Sosial Induk dan UPTD

No	Unit	Pendapatan LO (Rp)	Beban LO (Rp)	Surplus (Defisit) (Rp)
1	Dinas Sosial Induk	25.751.000,00	48.592.903.565,93	(48.567.152.565,93)
2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	-	8.584.601.329,61	(8.584.601.329,61)
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	-	4.489.555.857,24	(4.489.555.857,24)
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	-	8.728.313.889,66	(8.728.313.889,66)
5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	-	5.284.772.971,48	(5.284.772.971,48)
6	Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	-	6.034.194.841,07	(6.034.194.841,07)
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	384.000.000,00	6.877.803.235,67	(6.493.803.235,67)
	Jumlah	409.751.000,00	88.592.145.690,66	(88.182.394.690,66)

3.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Rp(297.820.994,46)

Rp(82.398.133,63)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar Tahun 2021 sebesar Rp(297.820.994,46) merupakan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.59 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

No	Unit	Ekuitas Awal (Rp)
1	Penyesuaian Saldo Awal	(273.631.994,46)
2	Ekstrakomtabel	(18.199.000,00)
3	Penghapusan Aset Tetap	(5.990.000,00)
	Jumlah	(297.820.994,46)

Adapun Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar Dinas Sosial Induk dan UPTD sebagai berikut:

Tabel 3.60 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Dinas Sosial Induk dan UPTD

No	Unit	Ekuitas Awal (Rp)
1	Dinas Sosial DIY (Induk)	
	Penyesuaian Saldo Awal	(292.415.000,05)
	Ekstrakomtabel	(1.633.500,00)
	Penghapusan Aset Tetap	(5.870.000,00)
	Jumlah	(299.918.500,05)

2	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	
	Penyesuaian Saldo Awal	(0,06)
	Jumlah	(0,06)
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	
	Ekstrakomtabel	(8.453.000,00)
	Jumlah	(8.453.000,00)
4	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	
	-	-
	Jumlah	0,00
5	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	
	Penyesuaian Saldo Awal	(0,01)
	Jumlah	(0,01)
6	Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	
	Penyesuaian Saldo Awal	18.783.005,59
	Penghapusan Aset Tetap	(120.000,00)
	Jumlah	18.663.005,59
7	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	
	Penyesuaian Saldo Awal	0,07
	Ekstrakomtabel	(8.112.500,00)
	Jumlah	(8.112.499,93)
	Jumlah	(297.820.994,46)

3.4.4 Ekuitas Akhir

Rp95.184.358.519,19

Rp94.366.147.531,27

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp95.184.358.519,19 merupakan kekayaan bersih yang dimiliki Dinas Sosial sampai dengan akhir Desember 2021.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Dinas Sosial DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Sosial DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2021. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 4.2 Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2020	TAHUN 2021				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<p><u>Indikator:</u> Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial</p> <p><u>Meta Indikator:</u> Persentase target penanganan PMKS dibagi jumlah populasi (N-2)</p> <p>Formulasi Perhitungan : Rata-Rata Prosentase Program Penanganan PMKS dibagi 9 = %Rehabsos+%Linjamsos+%Fakir Miskin+%BRTPD+%BP RSW+%BRSBK%BP R+ %BRSPA+%BPSTW dibagi 9</p>	%	n/a	103,98	43,08	40,91	94,96	Sangat Baik	92,38%